

Geliat Ekonomi Masyarakat Priangan Era Pemerintahan Hindia Belanda 1900—1942

SRI ANA HANDAYANI

Universitas Jember

Abstract

The aim of this research is to show the economic activity of the Priangan people during the rule of the Netherlands Indies Government between 1900-1940. The research focusses on the economic policies and discussions from the Netherlands Indies Government in reforming “native” economic life and its response by Priangan society. This study uses the historical method with four research stages, namely heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The result of this research shows that state intervention in the local economic life was a failure, evidenced by the number of Priangan people in poverty. In the early twentieth century, sikep (landlord) became major reformers due to a new perspective that valued capital more than land. They succeeded to use their capital to develop micro industries, influencing the economic life of Priangan society. The society was able to creatively adapt to the new policy of economic liberalism. Based on their local wisdoms, the Priangan people created a new form of liberalism supported within their socio-cultural, economic, and political structures. This local liberalism formed the pattern of dynamic economic behaviour and nurtured the entrepreneurial spirit amongst the Priangan society.

Keywords:

Priangan;
liberalism;
micro
industry;
enterprenurial
spirit

Abstrak

Kajian ini mengungkapkan tentang aktivitas ekonomi masyarakat Priangan masa Pemerintahan Hindia Belanda tahun 1900-1942. Fokus kajian ini adalah mengungkapkan latar belakang dan pertimbangan Pemerintahan Hindia Belanda mengadakan reformasi kehidupan ekonomi masyarakat Priangan, serta respons masyarakat Priangan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode sejarah yang memiliki empat tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat lokal tidak berhasil dengan baik. Hal ini terbukti bahwa masyarakat Priangan hidup dalam kemiskinan. Awal abad ke dua puluh, banyak *sikep (tuan tanah)* baru menjadi aktor perubahan, di mana mereka mempunyai pandangan baru tentang modal, yaitu uang bukan tanah. Mereka berhasil menggunakan modal (uang) mereka untuk membangun industri kecil dan pergaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Priangan. Masyarakat Priangan secara kreatif beradaptasi dengan sistem leberalisme yang dirintis oleh pemerintahan Hindia Belanda. Bertolak dari kearifan lokal yang telah dimiliki masyarakat dapat melahirkan liberalisme baru yang didukung oleh

Kata kunci:

Priangan;
liberalisme;
industri
kecil; jiwa
kewirausahaan

struktur sosial budaya, ekonomi, dan politik. Liberalisme lokal ini membentuk pola perilaku ekonomi yang dinamis yang menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat Priangan.

Pendahuluan

Dewasa ini Indonesia memasuki era globalisasi di segala bidang, di bidang ekonomi Indonesia tidak dapat menghindarkan diri dari kekuatan luar yang mendominasi pasar bebas. Untuk itu, masyarakat dituntut untuk ikut berperan dalam ekonomi kreatif. Mengingat pentingnya ekonomi kreatif, kajian mengenai geliat ekonomi masyarakat Priangan pada tahun 1900-1942 menjadi urgen. Dengan meneliti kreatifitas masyarakat Priangan dalam menghadapi liberalisme pemerintahan Hindia Belanda, diharapkan generasi muda terinspirasi untuk bergerak di bidang kewirausahaan yang secara gencar sedang digalakkan di Indonesia.

Priangan merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Priangan merupakan daerah penghasil kopi dan tanaman ekspor lainnya seperti tebu, nila, teh, kina, dan sebagainya. Kopi merupakan produksi yang paling utama dari Priangan pada periode ini. Produksi kopi yang berlimpah belum dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan karena sistem perdagangan kopi tidak melibatkan petani kopi Priangan secara langsung tetapi berdasarkan sistem ikatan desa yang feodal, hal ini dikenal sebagai sistem *Preangerstelsel*. Pada awal abad ke-19, sistem ekonomi di Priangan beralih ke Sistem Tanam Paksa, dimana negara ikut berperan dalam menentukan pola perdagangan terutama tanaman eksport.

Pada tahun 1870 Undang Undang Agraria diterapkan. Hal ini menyebabkan berkurangnya campur tangan negara. Periode ini dapat dipandang sebagai periode kebebasan perorangan untuk menanamkan modal atau swastanisasi perdagangan. Liberalisme selalu dikaitkan dengan ekonomi pasar yang sampai dewasa ini selalu menjadi sorotan dunia. Secara historis, liberalisme ekonomi bersamaan dengan penguasaan pasar-pasar Asia oleh orang-orang Eropa tidak terkecuali di Nusantara.

Liberalisme ekonomi dianggap sebagai titik balik dari Sistem Tanam Paksa yang menentukan bagi perkembangan ekonomi masyarakat di Hindia Belanda karena negara tidak lagi terlibat secara langsung di dalamnya. Hanya saja, liberalisme ini lebih menguntungkan orang Eropa yang padat modal dibandingkan dengan bumiputera. Dalam perkembangannya, masyarakat bumiputera tertinggal dan tersingkirkan dari aktivitas ekonomi. Hal ini juga membatasi pemasaran produk lokal karena membanjirnya produk luar negeri, terutama yang berasal dari Eropa dan Cina (Booth,1998:372). Pada saat itu, masyarakat bumiputera tidak dapat berkembang karena tidak mampu bersaing dengan pedagang Eropa dan Cina. Dalam posisi seperti itu,

masyarakat bumiputera tetap dengan ekonomi subsistennya, mengerdil, dan hidup dalam kemiskinan (Furnival,2009:426).

Perubahan kebijakan terjadi awal abad ke-20, di mana pemerintah Hindia Belanda menerapkan Politik Etis. Politik Etis merupakan titik balik perhatian pemerintah dalam kebijakan politik ekonominya, karena perhatian bukan hanya kepada golongan pengusaha Eropa dan Cina, melainkan juga mulai memperhatikan kepentingan masyarakat bumiputera terutama masyarakat pedesaan. Perhatian pemerintah terhadap masyarakat pedesaan diaktualisasikan dalam berbagai kebijakan ke arah program-program yang lebih khusus, pelaksanaannya melalui dinas-dinas kesejahteraan (Burger,1983:23). Penerapan Politik Etis yang berkaitan dengan pendidikan, pertanian, dan migrasi sangat mempengaruhi masyarakat bumiputera, dengan adaptasi dan kreativitas setahap demi setahap masyarakat bumiputera dapat mandiri secara ekonomi, sosial budaya, dan politik.

Pemerintah Hindia Belanda menerapkan berbagai kebijakan politik ekonominya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimum dari potensi ekonomi wilayah yang dikuasanya bagi negara induknya. Bagaimana respons masyarakat Priangan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, terutama dalam menghadapi liberalisme ekonomi. Artikel ini mengungkapkan kemandirian dan kebangkitan jiwa kewirausahaan masyarakat Priangan, berdasarkan kajian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Selain itu, menyoroti faktor-faktor yang melatarbelakangi tumbuhnya jiwa kewirausahaan, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Priangan dalam Lintas Sejarah

Secara geografis wilayah Priangan terletak di Jawa bagian barat, dan secara budaya masyarakat Priangan menganggap dirinya sebagai orang Sunda (Edi, 2005:8-12). Priangan ada yang mengartikan sebagai tempat tinggal dewa yang harus dihormati, ada juga yang mengartikan menyerah dengan hati yang tulus. Menyerah dengan hati yang tulus berkaitan dengan peristiwa saat pangeran Suriadiwangsa (Sumedang Larang) menyerahkan daerah Priangan kepada Sultan Mataram pada tahun 1620 (Mumuh, 2000:7). Topografi Priangan yang terdiri atas gunung-gunung dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit merupakan daerah yang terisolir sehingga tidak begitu menarik perhatian para penguasa maupun pendatang pada waktu itu. Mataram sebagai kerajaan besar di Jawa Tengah mengadakan ekspansi ke daerah lain, termasuk Priangan. Bersamaan dengan ekspansi Mataram ke Priangan, VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) sebagai kongsi dagang Belanda sedang meluaskan wilayah kekuasaannya di Nusantara. Mataram tidak dapat mempertahankan daerah Priangan, karena pergolakan internal yang melemahkan kekuasaannya. Pada tahun 1667, Priangan diserahkan oleh Mataram kepada VOC karena dianggap telah membantu Mataram dalam pergolakan internal, secara formal peralihan

kekuasaan terjadi tahun 1684 (Breman,2014:19).

VOC menembus ke pedalaman Priangan dengan dalih tanam kopi. Tanah Priangan memang cocok untuk tanaman kopi, sehingga VOC mendorong budi daya kopi. Kopi merupakan tanaman ekspor yang sangat penting karena harganya tinggi di pasaran dunia, sekalipun harganya berfluktuasi dari waktu ke waktu. Pada awalnya jual beli kopi menggunakan transaksi komersial, VOC membeli kopi melalui para pemimpin lokal dengan cara memberi uang muka, dan hasilnya harus dijual kepada pemberi uang muka dengan harga yang sudah ditentukan (Burger, 1962). Kemudian sistem jual beli kopi tidak berdasarkan transaksi komersial tetapi berdasarkan pemaksaan penyetoran kopi, selanjutnya menerapkan penyerahan wajib kopi atau *contingenten* (Breman,2014:1). Kopi dianggap sebagai komoditas yang menguntungkan, maka VOC mengadopsi kebijaksanaan pemerintahan lokal atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan cara memperbolehkan para penguasa bumiputera mengelola daerahnya secara tradisional. VOC tidak langsung mengelola perkebunan kopi, akan tetapi diserahkan kepada para pemimpin lokal. Untuk menjalankan penanaman kopi, para penguasa bumiputera (bupati) memerintahkan para pembantunya untuk mengerahkan para petani, cacah, dan anggota keluarga petani untuk mengerjakan penanam kopi, dari proses penanaman, pemeliharaan, panen, sampai penyimpanan ke gudang-gudang kopi yang telah ditentukan.

Penyerahan wajib kopi- yang kemudian dikenal sebagai *Preangerstelsel*- menguntungkan VOC, pada tahun 1730 VOC mendapat keuntungan 100% dari penanaman kopi di Priangan (Djuliati, 2002:118). Kopi menguntungkan VOC dan segelintir orang terutama para penguasa lokal. Petani kopi tidak banyak memperoleh keuntungan, karena tidak terlibat langsung dalam perdagangan kopi. Akan tetapi menurut Mumuh (2000), tanaman kopi telah mempengaruhi jalannya kehidupan sosial ekonomi masyarakat Priangan. Tanaman kopi dapat di tanam di areal tegalan, atau halaman rumah, bahkan kemudian di lereng-lereng gunung sehingga tidak mengganggu area tanaman pokok yaitu padi. Untuk wilayah Priangan, tanaman kopi dianggap lebih menguntungkan masyarakat dibandingkan dengan tanaman ekspor lainnya seperti tebu, walaupun harga penjualan kopi mengalami fluktuasi (Sobana,2002). Secara tidak langsung lalu lintas uang mulai dirasakan masyarakat di pedesaan walaupun jumlah nominalnya kecil.

Sejak tahun 1800, wilayah Nusantara diserahkan kepada pemerintahan Belanda karena VOC mengalami kebangkrutan. Sejak itulah, Hindia Belanda melakukan restrukturisasi wilayah Hindia Belanda agar pemerintah mudah menjalankan administrasi dan mengelola perekonomian Hindia Belanda.

Pada awalnya daerah Priangan tidak menjadi pusat perhatian kerajaan-kerajaan lokal atau migran dari luar, karena sampai dengan awal abad ke-19 Priangan merupakan daerah yang bercirikan *frontier*. Secara geografis,

Priangan merupakan daerah pegunungan dengan jumlah penduduk sedikit, sehingga baik secara politis maupun ekonomis daerah Priangan yang ada di pedalaman Pulau Jawa bagian barat sangat terisolir. VOC, tidak membangun dan membuka Priangan sebagai daerah terbuka. Hal ini didasarkan kepada kenyataan akan jaranginya penduduk yang dijumpai saat VOC menduduki dataran tinggi Priangan (Breman, 2014:22).

Pemerintah Hindia Belanda berusaha mereformasi birokrasi dan wilayah Hindia Belanda. Penetapan susunan administrasi tidak terjadi sekali, tetapi berulang kali sesuai dengan pertumbuhan dan kebutuhan administrasi. Pada awalnya Daendels membagi pulau Jawa menjadi 9 prefektur, salah satunya adalah prefektur Priangan yang terdiri atas wilayah Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakanmuncang dengan pusat pemerintahan di kota Cianjur. Baru pada tahun 1864, pusat pemerintahan Keresidenan Priangan dipindahkan ke Bandung, sehingga Bandung menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan administrasi keresidenan Priangan. Pada tahun 1926 terjadi perubahan administrasi, Pulau Jawa dibagi menjadi tiga propinsi, yaitu Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Keresidenan Priangan berada di wilayah Propinsi Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, dan Ciamis (Lubis, 2011:23)

Sejalan dengan kekuasaan Hindia Belanda terjadi restrukturisasi para penguasa lokal dengan jalan memberi gaji tetap sehingga mereka berada di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda, tetapi masih diberi kebebasan untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin tradisional di wilayahnya, berupa kehidupan budaya feodalismenya (Lubis, 1998:35-41). Elit bumiputera yang telah memobilisasi petani untuk bekerja tidak dapat lagi menikmati kekuasaan yang independen dan loyalitas yang tidak terbatas dan rumit dari para pengikutnya yang terdahulu, secara bertahap mereka telah didomestikasi dan bergantung kepada kolonial (Elson, 2000:154).

Pembuatan Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panarukan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, membuka isolasi daerah Priangan. Pembuatan Jalan Raya Pos mengubah sistem transformasi dari aliran sungai ke jalan darat, hal ini membawa dampak terutama perubahan pusat ekonomi yang pada awalnya berada di sekitar aliran sungai beralih ke jalan darat (Imam, 2014:154). Pembangunan Jalan Raya Pos ini telah mempengaruhi demografi, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Priangan.

Sistem Tanam Paksa kopi di Priangan ini dijadikan acuan oleh Van den Bosch untuk menerapkan Sistem Tanam Paksa berupa produk yang laku di pasaran dunia. Sistem Priangan ini dianggap cara yang paling manjur untuk mendapatkan keuntungan bagi negeri Belanda. Proyek raksasa Sistem Tanam Paksa diterapkan di Pulau Jawa tahun 1830-an, dengan berbagai aturan umum, akan tetapi penerapan di lapangan diserahkan kepada otoritas lokal (residen). Residen bertindak sebagai manager setempat, mereka diwajibkan

mendorong tanaman komersial sebanyak mungkin (Djuliati, 2002:120). Sistem Tanam Paksa merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai keuntungan maksimum dengan cara yang paling ekonomis dan efektif (Djuliati, 2001:127), karena faktanya Sistem Tanam Paksa memanfaatkan kerja wajib tanpa upah untuk menghasilkan tanaman dagang ekspor. Secara umum, implikasi Sistem Tanam Paksa bagi bumiputera tidak berpengaruh positif, bumiputera tetap tersisihkan karena terlalu lemah untuk berhadapan dengan pedagang Eropa atas dasar kesetaraan ekonomi dan budaya dalam transaksi perdagangan internasional.

Pada tahun 1870, pemerintah menerapkan kebijakan Undang-Undang Agraria, yang pada dasarnya mengatur pemberian hak milik tanah untuk pengusaha industri swasta dan penduduk. Penduduk tidak diperbolehkan membuka lahan tanpa izin pemerintah, sementara pemerintah menyewakan tanah publik kepada pengusaha yang membukaan perkebunan besar berdasarkan syarat-syarat tertentu. Pemerintah memberikan fasilitas bagi pengusaha swasta berupa modal dari bank pemerintah atau asing. Sementara pengusaha bumiputera tidak mendapat akses pinjaman ke bank pemerintah karena pinjaman mereka dianggap terlalu kecil, pinjaman kecil tidak menutup biaya administrasi dan risikonya besar. Liberalisme yang diterapkan pemerintah mempengaruhi ikatan tradisional masyarakat Priangan, dengan adanya perusahaan swasta, penduduk lebih bebas memilih pekerjaan, terutama bagi petani lapisan bawah (tidak memiliki tanah).

Pada umumnya kekayaan yang diperoleh pemerintah era liberalisme dari berbagai macam kegiatan tidak dapat dinikmati masyarakat, bahkan tidak dapat menumbuhkan pusat-pusat modal bumiputera dan produksi berskala modern. Hal ini terjadi karena penyaluran fasilitas hanya ke lapisan atas masyarakat majemuk, yaitu para kapitalis Eropa, Cina, dan sebagian bangsawan bumiputera yang pada dasarnya tidak produktif (Reid, 2004:308).

Gambaran masyarakat pedesaan sampai sekitar akhir abad ke-19 amat buram, potret kemiskinan masyarakat terekam dalam penggunaan uang kontan dalam transaksi perdagangan. Dalam transaksi ekonomi sehari-hari warga masih menggunakan barang (konsep timbal balik dan resiprositas), penggunaan uang sudah berjalan akan tetapi jumlah nominalnya kecil (Boeke, 1983:113). Masyarakat menggunakan uang sehari-hari terbatas dalam hitungan sen. Nominal paling besar adalah uang logam tembaga, masyarakat desa menggunakan uang ini sebagai barang yang sangat eksklusif. Kenyataannya dalam dunia perdagangan internasional bukan uang logam tembaga yang digunakan melainkan uang logam perak. (Creutzberg dan Van Laanen, 1987:311). Dengan demikian, masyarakat mengalami kesulitan dalam bertransaksi dengan dunia luar

Di sisi lain, Undang-Undang Agraria menyadarkan tuan tanah di Priangan bahwa tanah menjadi komoditas yang berharga, hal ini berbeda

dengan masa sebelumnya di mana tanah pada dasarnya tidak mengandung nilai ekonomi yang tinggi. Dampak langsung dari UUA adalah lahan pertanian atau tegalan naik sesuai dengan harga pasaran, nilai tanah relatif tinggi. Dengan meningkatnya harga jual tanah mempengaruhi cara pandang masyarakat Priangan terhadap tanah. Lalu lintas uang di pedesaan semakin meningkat karena komersialisasi tanah. Petani dengan lahan sempit menyewakan atau menjual tanahnya kepada pemilik modal, yang pada akhirnya mereka menjadi buruh tani di bekas lahannya sendiri. Kelas baru muncul- petani dengan lahan luas- yaitu tuan tanah yang berprofesi sebagai pengusaha dan mengembangkan kapitalisme.

Awal abad ke-20 pemerintah menerapkan kebijakan politik Etis, hal ini merupakan reformasi dalam kebijakan politik ekonomi pemerintahan Hindia Belanda. Penekanan Politik Etis cenderung ke arah program-program yang lebih khusus, pelaksanaannya melalui dinas kesejahteraan. Pemerintah melakukan penelitian terhadap kehidupan ekonomi masyarakat melalui dinas kesejahteraan. Dinas kesejahteraan seperti dinas kemakmuran bagian pengajaran, pertanian, transmigrasi, dan urusan perkreditan berusaha mengeluarkan peraturan untuk memberikan jalan ke luar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sangat lama terabaikan. Strukturisasi pemerintahan dan rekayasa sosial budaya maupun ekonomi dilakukan. Bidang pendidikan, pertanian, dan migrasi menjadi fokus utama pemerintah, hal ini merupakan langkah penting dari masa pemerintahan Hindia Belanda dalam menerapkan kebijakan sosial ekonominya bagi masyarakat bumiputera di kemudian hari. Salah satu dinas kesejahteraan yang mengalihkan program kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan adalah dinas perkreditan, dinas ini membentuk *Volkscredietwezen* yang terdiri dari lumbung desa, bank desa, serta bank afdeeling. Pemerintah menganggap kondisi masyarakat rentan terhadap kemiskinan memerlukan bantuan pinjaman untuk kebutuhan konsumsi maupun produksi, agar tidak terjerat utang para rentenir yang memberi bunga pinjaman sangat tinggi.

Sebelum pemerintah Hindia Belanda membentuk *volkscredietwezen* bagi masyarakat pedesaan, salah seorang bupati Priangan yang berkedudukan di Sumedang, yaitu Pangeran Aria Suria Atmadja (1851-1921) pada tahun 1901 membentuk bank priyayi (Lubis, 2000:89). Bank priyayi ini ditujukan untuk memberikan kredit kepada para anggotanya agar terhindar dari jeratan rentenir, tidak lama kemudian ia mendirikan bank desa untuk membantu petani kecil. Pangeran Aria sudah memberikan perhatian terhadap masyarakat melalui pemberian pinjaman dengan bunga rendah. Pada tahun 1915 bank priyayi menjadi Soemedang Afdeeling Bank, karena bank priyayi dilebur menjadi bank afdeeling sebagai bagian dari program *volkscredietwezen* (kredit mikro).

Pada awalnya kredit mikro ini diperuntukan bagi penduduk desa, akan

tetapi dalam perkembangannya lembaga keuangan ini menjadi badan milik desa dengan unsur-unsur koperasi di dalamnya (Muchdarsyah,1991:131). Menurut Sumitro (1989), perkembangan kredit mikro menjadi populer bank's dari pada people's bank, dengan kata lain kredit yang diberikan bersifat kredit statis dari pada kredit dinamis. Kredit statis hanya mempertahankan kesejahteraan yang sudah tercapai, sedangkan kredit dinamis di arahkan kepada hal yang sifatnya produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara historis, bagi masyarakat Priangan kredit bukanlah hal baru, kredit sudah dikenal oleh masyarakat dalam pengertian lokal, seperti sistem *maro*, *mertelu*, *ijon*, setelah uang dikenal luas di pedesaan dikenal kredit dalam bentuk uang (*rentenir/minding*) maupun barang. Setelah kredit mikro diterapkan di pedesaan, maka masyarakat mulai mengenal sistem kredit modern. Kredit modern bersifat impersonal dengan pengelolaan sepihak (pemilik modal) mengakibatkan bunga menjadi tinggi, kredit modern dikelola secara kontraktual dengan pengelolaan yang modern cenderung membuat bunga menjadi rendah. Pengelolaan kredit modern mengajarkan kepada masyarakat tentang simpan pinjam berdasarkan pembayaran yang teratur, disiplin, memahami ketertiban administrasi simpan pinjam secara sederhana, dan menumbuhkan kesadaran menabung. Menabung dalam bentuk uang adalah hal yang baru, sebelumnya masyarakat beranggapan bahwa investasi yang menguntungkan adalah tanah yang dapat menghasilkan bahan pangan. Hal inilah yang sangat mempengaruhi masyarakat Priangan dalam memahami kredit modern, yaitu modal bergerak dalam bentuk uang bukan tanah.

Priangan: Perubahan, Peluang, dan Kreativitas

Sekitar akhir abad ke-18, stratifikasi sosial masyarakat Priangan terdiri atas dua golongan besar yaitu golongan *menak* dan *jalma leutik/pribumi* (Lubis, 2000:68; Svenson,1989;29-34; Boomgarrd,2004:106-115). Di bawah golongan *menak* ada golongan *sentana/sikep* (priyayi rendah) yang secara tradisional menjadi perantara penguasa dengan masyarakat pedesaan. Menurut Alisyahbana (1954) struktur kelas orang Sunda era tanam paksa terdiri atas warga inti desa (*pribumi*), orang yang mempunyai rumah dan pekarangan (*manumpang*), dan orang yang memiliki rumah dia atas pekarangan orang lain (*bujang*).

Perbedaan antara golongan menengah di Jawa Barat dengan Jawa Tengah berkaitan dengan ikatan feodalisme. Feodalisme di Jawa Tengah sangat kental, sehingga golongan saudagar tidak dapat sejajar statusnya dengan golongan bangsawan. Golongan bangsawan menganggap perdagangan kurang terhormat bagi mereka, mereka memperlakukan saudagar sama dengan rakyat biasa. Perlakuan seperti ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi tumbuhnya mentalitas menjadi pegawai kantoran daripada menjadi pedagang, agar status sosial lebih baik dibandingkan dengan pedagang

(Sartono, 1969:33; Burger, 1970:227-229). Hal ini berbeda dengan di Jawa Barat di mana golongan menengah yang kuat agama Islamnya mempunyai kedudukan tinggi dan dipandang dengan hormat oleh masyarakat sekitarnya (Breman, 2014:357).

Secara historis, sampai sekitar akhir abad ke-16, tidak ada kekuasaan kerajaan lokal pada waktu itu yang benar-benar mempengaruhi kebudayaan masyarakat Priangan secara menyeluruh, terutama dalam hal kepemilikan tanah, ini juga belum tersentuh Mataram (Burger, 1970). Faktor geografis yang sulit dijangkau terutama daerah pedalaman Priangan, menumbuhkan hal yang berbeda di dibandingkan dengan masyarakat lain yang sangat dipengaruhi oleh Mataram, seperti Cirebon dan Banten. Di Jawa Tengah yang sangat terpengaruhi oleh Mataram, hak penguasa atas tanah desa sangat kuat dibandingkan dengan Jawa Barat. Di sisi lain, pemerintah kolonial tidak secara langsung berhubungan dengan rakyat karena mereka menggunakan pengaruh pemimpin bumiputera. Karena itulah bagi orang Sunda, hak milik seorang terhadap tanahnya sejak awal tidak terlalu terpengaruhi oleh golongan raja atau para bangsawan lainnya (Burger, 1970:230).

Menurut Imam (2012: 59) di Priangan banyak muncul kelas menengah yang tidak terikat dengan ikatan feodal yang kuat seperti Jawa Tengah yang secara sosial ekonomi dapat berkembang dengan baik. Jadi, di Priangan hak milik tanah secara pribadi tetap dapat berlangsung secara mulus. Luas lahan menandakan kekayaan, kepemilikan tanah secara pribadi inilah yang melahirkan golongan baru atau elite baru pedesaan. Pada awalnya tumbuh terlepas dari suasana desa, akan tetapi belum menemukan tempat yang menyenangkan di luar desa (Burger, 1970:228). Elite baru ini pada umumnya mendominasi harta bergerak yaitu uang, ciri utamanya adalah:

1. Mengontrol tanah
2. Memiliki banyak tanah dengan hak pribadi
3. Menguasai sumber tenaga kerja murah yang dapat dipekerjakan sebagai petani penggarap dan buruh tani.
4. Dapat mengontrol modal.

Di Priangan, elite baru inilah yang tumbuh terlepas dari penguasa yang lebih tinggi dari desa, tidak pernah ada yang dapat menghalangi perluasan tanah dan mengontrol modal. Mereka dapat memusatkan diri terhadap kegiatan usaha ekonomi yang baru, yaitu menggalakkan perdagangan, industri, dan kerajinan. Elite baru menjadi reformis di bidang perdagangan khususnya dalam kredit produktif untuk usaha. Mereka lahir menjadi elit baru pedesaan yang mendominasi kapital usaha-usaha perekonomian karena mereka dapat mengontrol tanah, memiliki tanah luas sebagai modal, serta dapat menguasai sumber tenaga kerja. Ada kecenderungan kuat golongan baru ini menjadi makmur serta mampu secara individual, walaupun dalam perkembangannya tidak terlepas dari bangun patron-klien. Pada akhirnya

yang menjalankan roda perekonomian adalah mereka yang mempunyai modal dan berani mengambil resiko serta berinisiatif memanfaatkan pasar. Mereka menginvestasikan modalnya dalam industri kecil (Warmelo, 1938:18). Mereka berani berspekulasi dalam perdagangan dan bersaing dengan pedagang Cina. Inilah yang membedakan dinamika industri dan perkreditan modern di Priangan dengan daerah lainnya.

Dampak lain dari akumulasi modal pada *sikep* baru adalah banyak petani kecil yang hanya hidup dari hasil pertanian dengan lahan yang semakin sempit semakin terpinggirkan dari kehidupan ekonomi. Jumlah penduduk meningkat sementara tanah tetap. Hal ini melahirkan ketidak seimbangan kehidupan sosial ekonomi di antara warga bumiputera sendiri. Dengan demikian, kesenjangan antara masyarakat yang kaya dengan yang miskin semakin tampak. Untuk itu, para pengusaha berusaha mengembangkan bentuk-bentuk pinjaman bukan untuk konsumtif, tetapi dalam pengertian bahwa dalam usaha harus ada kesepakatan harga yang sama-sama menguntungkan. Dengan demikian, para pengusaha tidak lagi mengakumulasi modal untuk kekayaan dirinya semata-mata, tetapi mereka menggunakan modalnya untuk membantu para petani dan pengrajin yang posisinya lemah dengan cara merangkul mereka sebagai sebagai patner kerja.

Industri yang dikelola oleh masyarakat Priangan adalah barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan dalam negeri. Pertumbuhan industri kecil ini berupa tekstil. Tahun 1927, lembaga tekstil di Bandung menemukan alat tenun yang dapat menghasilkan tujuh kali lebih banyak dibandingkan dengan alat tenun desa yang lama. Hal inilah yang menjadi pendorong bagi kemajuan industri tenun di Priangan, yang berpusat di Majalaya. Jumlah alat mesin bukan tenun bertambah dengan cepat terutama setelah mendapat aliran listrik listrik sekitar tahun 1935 (Burger,1970:195).

Pada tahun 1929 konjunktur di Hindia Belanda semakin memburuk karena nilai tukar uang di dalam negeri semakin lemah, mengakibatkan produk import demain mahal. Kondisi in mendorong dan memperbesar peluang bagi industri kerajinan bumiputera untuk mengisi pasar-pasar dalam negeri, produkproduk industri dalam negeri yang sederhana seperti industri kerajinan tenun, rokok, kayu, dan sebagainya sangat diperukan (Sumitro,1989:288-290).

Dari tahun 1930 hingga 1941 jumlah alat tenun bukan mesin bertambah, dari 500 menjadi 49.000 buah, sedangkan alat tenun mesin dari 40 buah menjadi 9000 buah, serta sekitar 500.000 buah alat tenun bukan mesin yang tua-tua digunakan di desa-desa. Dalam tahun 1940, sekitar 34% dari industri tenun terdapat di Keresidenan Priangan, 18 % berada di pekalongan, 12% di Surabaya, 9%di Solo, 7% di Cirebon, serta 4% di Kediri (Burger, 1970:195-196).

Perkembangan industri di Ciparay Rayon Majalaya Kabupaten Bandung di dominasi oleh kerajinan kain sarung. Dalam proses pembuatan sarung, pekerjaan tangan memainkan peranan penting, dan juga dianggap lebih sesuai

dengan struktur ekonomi masyarakat pada waktu itu. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Majalaya yang berkaitan dengan kepadatan penduduk, lahan pertanian yang semakin terbatas, perubahan struktur masyarakat yang mendukung kewirausahaan, transportasi yang mudah diakses sehingga mobilitas penduduk semakin tinggi, hal ini menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang kuat.

Industri kecil dibangun oleh para pengusaha bumiputera dengan mengupah para pekerja, modal berasal dari akumulasi produk pertanian yang dialihkan ke alat tenun. Dengan mengumpulkan para produsen kecil lainnya di bawah naungan satu atap, maka produksi dapat diawasi, standar produk terjaga, siklus produksi pendek, menghemat waktu dan tenaga kerja, sehingga dapat mengoptimalkan produk dengan skala besar yang membawa keuntungan lebih besar. Struktur sosial berupa hubungan patron klien, timbal balik, serta kesetiaan mendukung keberadaan industri kecil ini, pengusaha sebagai patron adapun pekerja sebagai klien (Warmello, 1938:51-52). Langkanya tenaga kerja di Asia Tenggara pada tahap awal karena budaya feodalisme tradisional masih sangat kuat, di mana seseorang menggunakan kekayaannya untuk memperoleh pengikut pribadi daripada akumulasi modal untuk mendapatkan tanah, karena tanah pada waktu itu pada dasarnya belum mengandung nilai ekonomis. Sekitar abad ke-19 ketika tekanan penduduk meningkat, ikatan ketergantungan pribadi tetap menonjol. Bagi patron tempat seseorang mengantungkan nasib tetap menjadi kunci untuk meraih status, memperoleh kekuasaan, dan kenikmatan hidup. Bagi klien, ketidakamanan akan harta milik dan bahkan nyawa sendiri membuatnya menghargai dan membutuhkan perlindungan dari tokoh yang lebih berpengaruh (Reid, 2004:308-309). Ikatan inilah yang digunakan oleh patron baru untuk mengelola industrinya. Para pengusaha Sunda lebih dapat mempertahankan kemerdekaan kewirausahaannya jauh lebih besar di sektor ini dibandingkan dengan sektor manufaktur lain yang berlokasi di Jawa Tengah atau Jawa Timur yang benar-benar dikuasai oleh orang Eropa atau Cina (Svensson, 1987:37).

Perkembangan industri dan kain batik di Tasikmalaya merupakan hasil dari kekuatan koperasi Mitra Batik yang dikelola oleh pengusaha dan pengrajin batik diketuai oleh R.S.A. Kosasih (Miftahul, 2009:157). Dengan terbentuknya koperasi ini, maka para anggota koperasi dapat membeli kain mori secara langsung kepada importir. Demikian juga dengan pengusaha payung, mereka mendapat izin untuk membeli kerta pak secara langsung kepada importir sebagai bahan baku payung, yang kemudian dikenal sebagai payung geulis. Dari tahun 1934 sekitar 330.000 buah, pada tahun 1941 produksi payung menjadi 1.800.000 buah (Burger, 1970:196). Peningkatan produksi yang sangat signifikan dalam enam tahun masa produksi payung.

Kreativitas paraturan tanah (*sikep*) baru di Priangan melahirkan jiwa kewirausahaan, mereka bebas menterjemahkan pemahaman kapitalisme dan liberalisme. Mereka sudah memikirkan produk yang berorientasi

pasar walaupun harus bersaing dengan pengusaha Eropa dan Cina. Mereka berhasil mengadopsi sistem ekonomi modern menjadi sistem baru tanpa meninggalkan faktor patron klien, gotong royong, dan semangat kekeluargaan. Ekonomi pasar direspon mereka, modal bergerak dalam bentuk/uang dipakai untuk hal yang produktif, juga menghimpun dana dari warga dalam bentuk lembaga koperasi. Ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri membentuk mentalitas rasional yang dapat membaca situasi dan kondisi pasar. Gambaran pribumi malas yang diargumentasikan oleh kolonial Belanda terpatahkan pada saat pribumi dapat memahami ekonomi pasar. Pada saat krisis moneter melanda dunia sekitar tahun 1920-1930 an, industri orang Eropa dan sebagian Cina banyak mengalami kebangkrutan, sementara industri kecil yang dikelola masyarakat Priangan dapat bertahan dengan segala kekurangannya. Menurut Sumitro (1989:231), hal ini terjadi karena ada perbedaan yang mendasar dalam pengelolaan industri besar dengan kecil. Pada saat terjadi depresi, industri besar terikat pada pengeluaran-pengeluaran tetapnya yang besar, sementara daya beli masyarakat semakin menurun, maka pabrik besar akan mengalami kerugian yang mengakibatkan terjadi pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja. Sebaliknya jenis industri kecil lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah tanpa menimbulkan akibat yang paling buruk. Rendahnya pengeluaran tetap dan elastis menghadapi komponen biaya untuk upah yang dianggap sebagai unsur penting perindustrian.

Kesimpulan

Masyarakat Priangan tidak terbelenggu dalam kemiskinan sebagai akibat dari berbagai kebijakan politik ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi dengan membentuk mentalitas dan budaya ekonomi tandingan, yaitu memadukan aspek kapitalisme dengan modal sosial yang sudah mengakar sebagai dasar dari kewirausahaan mereka. Kelas menengah yang punya fungsi ekonomi dalam hal ini tuan tanah berhasil merevitalisasi pola pemikiran ekonomi lokal untuk menghadapi liberalisme kolonial.

Kebangkitan kewirausahaan ini dapat tumbuh karena adanya faktor eksternal dan internal dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Faktor eksternal, tidak ada satu kekuatan kerajaan lokal yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial seperti yang terjadi di wilayah lain. Pengaruh Mataram yang erat kaitannya dengan feodalisme di pedalaman Priangan belum begitu kuat, sehingga feodalisme yang terbentuk lebih longgar dibandingkan dengan daerah kekuasaan Mataram lainnya. Pada masa kekuasaan VOC, pedalaman Priangan tidak tersentuh secara langsung karena VOC berhubungan dengan masyarakat di pedalaman Priangan secara langsung. Demikian juga era pemerintahan Hindia Belanda yang menerapkan Sistem Tanam Paksa.

Kebijakan Undang-Undang Agraria dan Politik Etis sangat mempengaruhi perubahan persepsi masyarakat terhadap modal bergerak yang berkaitan dengan uang. Pembuatan jalan Anyer-Panarukan melalui jalur Priangan ikut berperan dalam membuka isolasi pedalaman Priangan. Dampaknya terjadi arus urbanisasi, juga dalam batas-batas tertentu masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas jalan raya, sehingga masyarakat Priangan berpeluang mengembangkan kehidupan ekonomi mereka melalui perdagangan. Kemudian tahun 1930-an krisis moneter yang melanda secara global mempengaruhi daya beli masyarakat, maka industri kecil bumiputera dapat mengisi pasar dalam negeri.

Faktor internal berkaitan dengan ikatan feodalisme yang agak longgar, memberi peluang ke arah terjadinya mobilitas sosial tuan tanah sebagai kelas menengah baru untuk menjadi pengusaha berdasarkan modal benda bergerak atau uang. Ikatan patron klien tetap bertahan, karena hal ini merupakan dasar dari kepercayaan atas perlindungan yang sama-sama menguntungkan antara pelindung (pemilik modal) dan yang dilindungi (pekerja). Hal ini dapat menumbuhkan industri kecil yang fleksibel dalam menghadapi fluktuasi harga.

Kajian mengenai pertumbuhan jiwa kewirausahaan masyarakat Sunda masih sangat terbuka, karena banyak data yang belum terungkap yang berkaitan dengan perubahan masyarakat Sunda selama masa pemerintahan Hindia Belanda.

Referensi

- A.M. Djuliaty Suroyo (2012). 'Penanaman Negara di Jawa dan Negara Kolonial', dalam: J. Thomas Lindblad (eds.), *Fondasi Fistoris Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi sosial Asia Tenggara UGM dengan Pustaka Pelajar, hlm. 115-142.
- Alisjahbana, Samiati (1954). 'A Prelimari Study of Class Structure among The Sundanese in the Priangan', Thesis unplished: New York Cornel Universty, .
- Boeke, J.H. (1983). *Prakapitalisme di Asia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Booth, Anne (1998). 'Perdagangan, Pertumbuhan dan Perkembangan Perekonomian Kolonial', dalam Anne Booth, J.O William Malley, Anna Weideman (eds.) . *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Breman, Jan (2014). *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi Di Jawa 1720-1870*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Breman, Yan (1986). *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*, Jakarta: LP3ES.
- Burger, D.H. (1962). *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Jilid I. Djakarta: Pradnja Paramita.
- Burger, D.H. (1970) *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Jilid I. Djakarta: Pradnja Paramita.
- Creutzbergh, Pieter dan J.T.M. van Laanen (1987). *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Denys, Lombard (1985). *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah terpadu: Warisan*

- Kerajaan Konsentris*. Jilid I. Penterjemah Winarsih Partaningrat Arifin, dkk. Jakarta: Gramedia.
- Edi S. Ekadjati (2005). *Kebudayaan Sunda Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Elson, R.E. (2012). "Dari 'State Ke State': Rezim yang Berubah Dari Produksi Eksport Petani pada Pertengahan Abad Ke-19 Di Jawa", dalam: J. Thomas Lindblad (eds.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi sosial Asia Tenggara UGM dengan Pustaka Pelajar, hlm. 143-158.
- Furnivall, J.S. (2009). *Hindia Belanda Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institut.
- Iman Gunarto (2012). *Infrastruktur Ekonomi Abad XIX: Pembangunan Jalan Raya Daendles sebagai Media Integrasi Ekonomi di Wilayah Priangan*. Jakarta: Limas.
- Miftahul Falah (2009). 'Perubahan Sosial Di Kota Tasikmalaya, Thesis Universitas Padjadjaran.
- Muchdarsyah Sinungan (1991). *Uang dan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mumuh Muhsin Mumuh (2010). 'Priangan Abad ke-19 Dalam Arus Dinamika Sosial Ekonomi, Disertasi Universitas Padjadjaran.
- Lubis, Nina Herlina (1998). *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Lubis, Nina Herlina (2000). 'Sumedang', dalam Nina Herlina Lubis, dkk. *Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat*. Bandung: Alqaprint, hlm.71-90.
- Lubis, Nina Herlina (2012). 'Pendahuluan', dalam Nina Herlina Lubid dkk., *Sejarah Kebudayaan Sunda*. Bandung: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, hlm.1-34.
- Reid, Anthony (2004). *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Reiza D. Reiza (2000). "Cianjur". Dalam *Sejarah Kota-kota Lama Di Jawa Barat*. Bandung: Alqaprint Jatinangor, hlm. 133-156.
- Scheltema.A.M.P.A. (1927). ' de ontwikkeling van de Agrarische Teostanden in Priangan', dalam *Lanbouw, Tijdschrift der Vereeniging van Landbouwconsuleten in Nederlandsch-Indie*. Derde Jrg, hlm. 271-305.
- Sumitro Djojohadikusumo (1989). *Kredit Rakyat Di Masa Depresi*. Jakarta: LP3ES.
- Svensson, Tommy (1980). *Peasants and Politics in Early Twentieth-Century West Java*. South-East Asian History Project Departement of History University of Gothenburg.
- Svenson, Thommy (1989). 'The Making of the Local Colonial State in Historical Perspective: Urang Belanda, Menak and Bumi in Priangan Since 1870' in Paper for the Confrence. Wassenar: Netherland Institute for Advance Studies.
- Van Warmelo, W.L.O. (1938). *De Ontwikkeling van Deklein Handweefnijverheid in Het Madjalaya Rayon*. Batavia: Departement van Economische Zaken.